

VISI DAN MISI
CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU UTARA 2018-2023
KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc, M.Pd.I DAN Ir. M. AL YASIN ALI, M.MT
“Maluku Utara SEJAHTERA 2023”

A. Latar Belakang

Provinsi Maluku Utara tercatat sebagai salah satu provinsi yang lahir pasca reformasi melalui Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Dalam undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat diharapkan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Provinsi Maluku Utara luasnya 145.801,10 km² terdiri dari luas wilayah laut, 113.796,53 km² (69,08%), dan daratan seluas 32.004,57 km² (30,92 %), dengan panjang garis pantai ± 5.624,66 km, berada di ALKI III, dan ditepian Samudera Pasifik, juga sebagai provinsi kepulauan, serta daerah perbatasan negara (Palao). Posisi letak tersebut secara geopolitik dan geostrategis merupakan peluang sekaligus tantangan dimasa kini dan dimasa mendatang. Provinsi Maluku Utara yang tergolong melimpah sumber daya alamnya dan secara geografis berada di tepian pasifik harus dapat didesain sebagai wilayah NKRI yang siap menghadapi kompetisi global dan kebangkitan ekonomi pasifik dimasa mendatang. Maluku Utara harus merupakan bagian yang terintegrasi dalam mendorong percepatan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat.

Dengan penduduk 1.185.912 jiwa pada Tahun 2016, Maluku Utara merupakan daerah yang multikultural, memiliki keragaman sosial dan budaya dengan penduduk yang mencirikan beragam etnis dan sub etnis. Keragaman ini mencerminkan konfigurasi tersendiri dan menjadi kekuatan yang harus dilestarikan sebagai modal sosial pembangunan agar tercipta keharmonisan disertai semangat keberagaman dalam bingkai nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal. Pembangunan sumberdaya manusia di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan peningkatan pendapatan harus terus dipacu untuk mengejar ketertinggalan dan mewujudkan kuantitas dan kualitas SDM yang pada gilirannya dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Provinsi Maluku Utara merupakan daerah yang memiliki potensi sumberdaya alam yang melimpah, dengan 4 (empat) potensi unggulan sebagai *core business* (keluatan-perikanan, pariwisata, industri pertambangan, dan pertanian-perkebunan). Sumber Daya Alam tersebut sebagai modal ekonomi kawasan yang belum dikelola secara optimal dan sebagian besar masih bersifat potensi, sehingga kedepan perlu dikelola secara baik dan optimal untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, harus terus didorong investasi melalui promosi potensi daerah dan pelayanan PTSP yang tidak birokratis yang telah kami wujudkan saat ini, guna efektif dan efisien, dengan tetap menjaga pelestarian lingkungan hidup dalam setiap pengelolaan sumber daya alam dan aktifitas investasi. Demikian juga pengelolaan penerimaan pendapatan daerah belum optimal karena itu perlu dioptimalkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan, serta pematapan tata kelola pemerintahan yang juga harus menjadi target peningkatan kinerja pemerintahan kedepan.

Sebagai provinsi yang usianya baru memasuki 18 tahun, ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah masih perlu dipacu, seperti infrastruktur jalan-jembatan, pelabuhan, bandara, air bersih dan sanitasi, listrik, telekomunikasi, serta sarana prasarana pendidikan, kesehatan, keagamaan, pertanian-perkebunan, perikanan, pariwisata, dan industri kecil menengah.

Tidak dapat dipungkiri pada periode kepemimpinan kami saat ini, masa bakti 2014-2019, capaian kinerja pembangunan baik dari aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah, sampai Tahun 2017 relatif sudah terdapat banyak kemajuan-kemajuan yang berhasil diletakkan. Disadari pula masih banyak tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang masih harus terus ditingkatkan dimasa mendatang.

Untuk itu, dalam 5 (lima) tahun kedepan masih tetap diperlukan keberlanjutan kebijakan pembangunan yang menyentuh pada pengentasan kemiskinan (*pro poor*), penyediaan lapangan kerja (*pro job*), memacu pertumbuhan ekonomi (*pro growth*) dan pembangunan yang berbasis lingkungan (*pro environment*) guna peningkatan kesejahteraan rakyat.

Implementasi otonomi daerah sesungguhnya telah mendorong kemajuan pembangunan diberbagai bidang di daerah. Hal ini dimungkinkan sebagai akibat berkembangnya kreatifitas dan inovasi daerah serta transfer fiskal ke daerah yang terus mengalami peningkatan. Walaupun demikian, tentu saja kita masih menghadapi sejumlah kendala yang relatif belum terkelola secara baik, terutama pada level konsepsi maupun implementasi kebijakan.

Kebijakan otonomisasi juga berkaitan erat dengan upaya mendorong kemandirian dan pemerataan pembangunan di daerah. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung adalah satu langkah maju dan merupakan bagian dari reformasi politik yang menentukan bagi proses perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya, dan kemasyarakatan di daerah dalam rangka penguatan *civil society* sebagai entitas penting demokratisasi lokal yang mempengaruhi tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*).

Dengan demikian, momentum pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Periode 2018–2023, bukan hanya sekedar ajang kompetisi politik semata, tapi juga adalah peluang bagi perbaikan kualitas demokrasi lokal yang berperadaban, serta memberi ruang bagi masyarakat untuk menilai visi-misi pembangunan yang terukur.

Untuk memenuhi tahapan politik dalam kompetisi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara tahun 2018 – 2023, maka kami perlu menyusun pandangan masa depan Maluku Utara dalam bentuk Visi dan Misi. Selanjutnya, Visi dan Misi ini disusun dengan memperhatikan kesinambungan pembangunan, kondisi obyektif dan dinamika sosial, politik, ekonomi, serta budaya yang berlangsung di daerah.

Sebagai provinsi kepulauan, Maluku Utara memiliki karakteristik geografis yang unik yang membutuhkan perhatian serius, terutama pada pembangunan sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur, pembangunan daerah perbatasan, daerah tertinggal, pengembangan investasi, keseimbangan ekonomi dan ekologi dalam eksploitasi sumberdaya alam, kebutuhan pelayanan dasar, peningkatan ekonomi rakyat, pemantapan tata kelola pemerintahan, kemandirian daerah untuk keberlanjutan pembangunan Maluku Utara.

B. Isu-Isu Strategis

Terdapat 5 (lima) Isu Strategis yang dapat diidentifikasi, yaitu sebagai berikut:

1. Pendidikan dan Kesehatan

Ketersediaan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan belum memadai, sehingga masih perlu ditingkatkan. Demikian juga Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang pendidikan dan kesehatan baik kuantitas maupun kualitas masih perlu ditingkatkan;

2. Pembangunan Infrastruktur

Ketersediaan Infrastruktur wilayah yang masih terbatas, sehingga konektivitas dan aksesibilitas antar desa-kota, antar wilayah dan antar pulau belum tercipta secara memadai yang berdampak pada lambatnya pelayanan publik dan aktivitas ekonomi masyarakat.

3. Wilayah Perbatasan, Daerah Tertinggal dan Iklim Investasi

Pengamanan wilayah perbatasan antar negara di Provinsi Maluku Utara perlu ditingkatkan untuk mencegah terjadinya *illegal fishing*, penyelundupan dan gangguan keamanan lainnya, percepatan pembangunan daerah tertinggal, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah sebagai bagian membangun Indonesia dari pinggiran.

4. Pembangunan Ekonomi dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Pertumbuhan ekonomi perlu terus ditingkatkan melalui kegiatan ekonomi produktif dan pemanfaatan Sumber Daya Alam berbasis lingkungan hidup untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat dan pendapatan daerah.

5. Kehidupan Sosial dan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kualitas kehidupan sosial yang terjamin menjadi salah satu penunjang keberhasilan pembangunan, dan juga tata kelola pemerintahan masih perlu di optimalkan guna peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagai bagian dari pembangunan revolusi mental.

C. Visi dan Misi

1. Visi

Secara umum, visi yang dirumuskan memiliki sasaran penguatan terhadap peningkatan kualitas sumberdaya manusia, kapasitas maupun daya dukung (*carring capacity*) pembangunan daerah, meningkatkan profesionalisme aparatur, serta peningkatan pengelolaan potensi daerah yang bertumpu pada kemampuan dan daya dukung sumberdaya alam, maupun potensi ekonomi yang dimiliki Provinsi Maluku Utara.

Visi yang kami sampaikan adalah tentang apa yang sedang dan akan dihadapi Maluku Utara, untuk selanjutnya merumuskan solusi bagaimana daerah dan masyarakatnya bisa dibawa kearah yang lebih baik, melalui manajemen yang terarah, konsisten dengan sumberdaya yang terkonsolidasi. Manajemen bisa dilakukan penyesuaian, namun ideologi inti yang menjadi kesadaran mutlak tentang identitas yang diperjuangkan akan tetap bertahan sebagai sumber arahan dan inspirasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.

Ideologi inti yang menjadi motivasi dan inspirasi kami ialah, keikhlasan untuk berbuat yang terbaik bagi masyarakat dan daerah, dengan berupaya mendayagunakan potensi sumberdaya yang ada secara maksimal, terarah dan efektif dalam menjamin kualitas pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat untuk kesejahteraan rakyat.

Adapun visi kami adalah : **“Maluku Utara SEJAHTERA 2023”**

Penjelasan Visi :

Kata **SEJAHTERA** yang terkandung dalam visi ini adalah akronim dari kata **Sehat, Cerdas, Maju, Aman, Harmonis, Tumbuh, Berakhlak** dan **Adil**, sebagai tujuan yang ingin dicapai. Adapun makna Sejahtera yaitu adanya peningkatan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkualitas melalui pemanfaatan sumberdaya alam yang berbasis lingkungan hidup, yang bertumpu pada sektor kelautan-perikanan, pariwisata, industri pertambangan dan pertanian-perkebunan.

Untuk mewujudkan Maluku Utara Sehat, Cerdas, Maju, Aman, Harmonis, Berakhlak, dan Adil 2023, maka dijabarkan visi sebagai berikut:

- Membangun Maluku Utara **Sehat**, mengandung arti mewujudkan keadaan sejahtera dari jasmani dan rohani maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis;

- Membangun Maluku Utara **Cerdas**, mengandung arti mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, amanah dan berdaya saing melalui pendidikan dan ketrampilan, serta menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Mendorong Maluku Utara **Maju**, mengandung arti menciptakan kemajuan pembangunan disegala bidang dengan memperhatikan kondisi spasial (kewilayahan). Mempercepat akselerasi pembangunan daerah dengan memacu pembangunan infrastruktur, pertumbuhan/perkembangan wilayah dan integrasi wilayah kepulauan, serta mengembangkan sektor-sektor strategis dan potensial;
- Mendorong Maluku Utara **Aman**, mengandung arti mewujudkan masyarakat yang nyaman, bebas dari rasa takut dan kekhawatiran. Meningkatkan toleransi tanpa membedakan agama, golongan, suku dan pandangan politik. Menjauhkan masyarakat dari konflik dan sengketa dengan terciptanya kerukunan, peningkatan produktivitas hidup yang lebih baik, serta mendukung stabilitas keamanan di daerah dan terciptanya iklim investasi yang kondusif;
- Mendorong Maluku Utara **Harmonis**, mengandung arti mewujudkan keseimbangan yang elok antara semua elemen, antar sektor dan antar wilayah serta antar level pemerintahan. Penguatan koordinasi dalam menyelesaikan setiap kendala pembangunan daerah dengan mengutamakan asas saling menghargai dan menghormati;
- Membangun Maluku Utara **Tumbuh**, mengandung arti mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan mendorong penyerapan tenaga kerja secara luas, pemerataan pembangunan dan pengendalian lingkungan hidup;
- Mendorong Maluku Utara **Berakhlak**, mengandung arti mewujudkan masyarakat yang agamis, penuh kedamaian, kasih sayang, membangun tatanan kehidupan yang sehat, sejahtera lahir dan bathin menurut tuntunan ajaran agama yang dianut dan tata nilai lokal (*local value*). Mengutamakan nilai-nilai agama sebagai landasan pijak dalam melaksanakan semua sendi kehidupan masyarakat. Menumbuhkan kesadaran keberagaman dan spiritualitas didalam masyarakat untuk menangkal berbagai dampak pengaruh modernitas;
- Mendorong Maluku Utara **Adil**, mengandung arti mewujudkan keterbukaan akses dan kesempatan yang merata dalam pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan berwibawa. Mendorong prinsip persamaan hak dihadapan hukum dan pemerintahan yang diarahkan pada penegakan supremasi hukum dan perlindungan HAM.

2. Misi:

Untuk mewujudkan Visi “**Maluku Utara SEJAHTERA 2023**”, ada 7 (tujuh) Misi yang diuraikan sebagai berikut :

- 1) Membangun Maluku Utara Sehat (**Misi Sehat**);
- 2) Membangun Maluku Utara Cerdas dan Berbudaya (**Misi Cerdas**);
- 3) Mendorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah (**Misi Maju**);
- 4) Mendorong Maluku Utara Damai, saling Menghargai, Rukun dan Toleran (**Misi Aman dan Harmonis**);
- 5) Membangun Ekonomi Rakyat, Daya Saing, serta Pengelolaan Sumber Daya Alam berbasis Lingkungan Hidup (**Misi Tumbuh**);
- 6) Mendorong Maluku Utara yang Agamis (**Misi Berakhlak**);
- 7) Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Lebih Baik dan Berkeadilan (**Misi Adil**).

Penjelasan Misi:

- 1) Membangun Maluku Utara Sehat. Misi ini untuk mewujudkan kesehatan murah, terjangkau dan berkualitas; yang diarahkan pada upaya meningkatkan sumber daya manusia, melalui peningkatan derajat kesehatan dengan perluasan akses yang mudah, dukungan sarana dan prasarana yang memadai, ketersediaan dokter, dokter spesialis, tenaga kesehatan dan keperawatan yang cukup, serta mutu pelayanan kesehatan yang memadai;
- 2) Membangun Maluku Utara Cerdas dan Berbudaya. Misi ini untuk mewujudkan pendidikan murah, terjangkau dan berkualitas; yang diarahkan pada upaya peningkatan sumber daya manusia, khususnya peningkatan derajat pendidikan melalui perluasan akses pendidikan (SMA/SMK, S1, S2 dan S3), sarana dan prasarana yang memadai, tenaga guru yang cukup, peningkatan mutu dan kualitas pendidikan dan kebudayaan;
- 3) Mendorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah, Misi ini diarahkan pada upaya percepatan infrastruktur penunjang perekonomian daerah. Memperluas konektivitas antar daerah, antar wilayah dan antar pulau dengan membangun jaringan transportasi yang terhubung menjadi kunci terbukanya isolasi wilayah. Mobilitas barang, jasa dan manusia yang cepat sebagai faktor penentu pertumbuhan perekonomian daerah. Daya dukung infrastruktur diharapkan menstimulir laju percepatan pembangunan daerah;
- 4) Mendorong Maluku Utara Damai, saling Menghargai, Rukun dan Toleran, Misi ini diarahkan pada upaya peningkatan situasi aman dan harmonis. Maluku Utara kedepan diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Upaya tersebut harus diwujudkan dengan terjaminnya stabilitas keamanan di daerah dan terciptanya iklim investasi yang kondusif, keselarasan dan keseimbangan lingkungan sosial dengan mengakomodasi dinamika ekonomi, sosial budaya, dan politik secara seimbang, terpeliharanya persatuan dan kesatuan, meningkatkan wawasan kebangsaan dan memperkokoh NKRI.
- 5) Membangun Ekonomi Rakyat, Daya Saing, serta Pengelolaan Sumber Daya Alam berbasis Lingkungan Hidup, Misi ini untuk mendorong ekonomi kerakyatan. Perbaikan sarana prasarana ekonomi bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Peningkatan mutu dan kualitas komoditi pertanian, perkebunan, perikanan dan perluasan akses pasar. Peningkatan ekonomi rakyat melalui pengembangan koperasi, UKM dan perluasan lapangan kerja, yang diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani, nelayan, dan pelaku usaha. Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Alam yang berbasis lingkungan Hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 6) Mendorong Maluku Utara yang Agamis, Misi ini untuk membangun kesadaran nilai keagamaan dan kepedulian sosial, yang diarahkan untuk menjawab permasalahan daerah seperti sering timbulnya gangguan KAMTIBMAS, menurunnya solidaritas sosial dan nilai-nilai kearifan lokal sebagai identitas daerah dan jati diri masyarakat, meningkatkan etos sosial dan nilai-nilai keagamaan dalam menghadapi dinamika modernisasi;
- 7) Memantapkan Tatakelola Pemerintah yang Lebih Baik dan Berkeadilan, Misi ini untuk mewujudkan perbaikan dan peningkatan *performance* birokrasi pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif. Tata kelola pemerintahan perlu mendapat perhatian terutama optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, pengelolaan keuangan daerah dan pentaan aset daerah. Perbaikan atas sistem tata kelola ini diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia/ aparatur, dukungan sarana prasarana yang memadai maupun penguatan pengawasan internal. Mendorong penegakan supremasi hukum, perlindungan HAM, keterbukaan akses dan kesempatan yang merata dalam pelayanan publik dan kesempatan berusaha secara adil.

D. Program Prioritas

Berdasarkan Isu-Isu Strategis dan 5 (lima) Misi pembangunan maka dapat dirumsukan 5 agenda Prioritas Pembangunan, sebagai berikut:

1. Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia (Pendidikan dan Kesehatan);

Program prioritas ini diwujudkan melalui fokus pada beberapa agenda kegiatan antara lain :

- Penyediaan sarana dan parasarana pendidikan yang memadai;
- Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan;
- Pemberian beasiswa dan fasilitasi melanjutkan pendidikan bagi siswa dan mahasiswa berprestasi dan tidak mampu serta bagi PNS Pemerintah Provinsi Maluku Utara, baik pendidikan di dalam negeri maupun di luar negeri;
- Pengembangan Sekolah Menengah dan Kejuruan, serta dukungan pengembangan Perguruan Tinggi;
- Peningkatan kualitas guru melalui tugas belajar, Kursus Kecakapan Hidup (*Live Skills*), training, magang, dan study banding (*exposure*);
- Peningkatan kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Rumah Sakit Rujukan Utama Sofifi, dan Rumah Sakit Jiwa Sofifi, serta melanjutkan pembangunan Fakultas Kedokteran Universitas Khairun;
- Peningkatan kualitas lingkungan hidup bersih dan sehat, serta sanitasi masyarakat yang terjangkau;
- Penyediaan sarana-prasarana kesehatan yang memadai;
- Penambahan jumlah tenaga medis, dokter umum dan dokter spesialis;
- Peningkatan kualitas dan profesionalisme tenaga medis;
- Perbaikan kesejahteraan tenaga medis;
- Penyediaan dan pendistribusian obat-obatan secara memadai;
- Perbaikan gizi Ibu hamil, menyusui, dan balita.

2. Percepatan Pembangunan Infrastruktur;

Program prioritas ini diwujudkan melalui fokus pada beberapa agenda, kegiatan antara lain:

- Peningkatan infrastruktur dasar pendidikan dan kesehatan;
- Peningkatan pembangunan jaringan listrik, penyediaan sarana-parasarana air bersih, sanitasi dan penataan kawasan permukiman;
- Percepatan pembangunan infrastruktur jalan/jembatan lingkaran Pulau Halmahera, Lingkaran Pulau Bacan, Lingkaran Pulau Obi, Lingkaran Pulau Mangoli, Lingkaran Pulau Sulabesi dan Lingkaran Pulau Taliabu;
- Mendorong pembangunan infrastruktur Kota Baru Sofifi dan penunjang Kawasan Ekonomi Khusus Morotai;

- Peningkatan pembangunan jaringan irigasi dan pengairan;
- Peningkatan pembangunan infrastruktur pariwisata dan perikanan;
- Peningkatan pembangunan infrastruktur perhubungan darat, laut dan udara;
- Mendorong peningkatan/pembangunan pelabuhan penyebarangan sebagai simpul konektivitas antar kabupaten, antar pulau dan antar wilayah;
- Mendukung kebijakan Poros Maritim dan Pembangunan Tol-Laut;
- Pengembangan Jaringan Telekomunikasi.

3. Mendorong Pengamanan Wilayah Perbatasan, Daerah Tertinggal dan Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif;

Program prioritas ini diwujudkan melalui fokus pada beberapa agenda, kegiatan antara lain:

- Peningkatan pengawasan wilayah laut daerah perbatasan;
- Pembangunan wilayah perbatasan dan daerah tertinggal;
- Pengembangan investasi dan kepastian hukum, serta penyederhanaan perizinan dalam berinvestasi.

4. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam berbasis Lingkungan Hidup;

Program prioritas ini akan diwujudkan melalui fokus pada beberapa agenda, kegiatan antara lain:

- Peningkatan pembangunan pertanian, pengembangan Sumberdaya Petani dan Nelayan;
- Peningkatan pembangunan pertanian di kawasan transmigrasi sebagai sentra produksi/lumbung pangan untuk terwujudnya kedaulatan pangan;
- Penyediaan sarana prasarana pertanian dan perikanan tangkap maupun budidaya;
- Fasilitasi pemasaran hasil produksi petani dan nelayan;
- Peremajaan dan pengembangan tanaman perkebunan kelapa masyarakat (kelapa dalam dan kelapa Bido), kakao, cengkeh dan pala;
- Pembangunan Jalan Kebun (jalan sentra produksi);
- Pengembangan potensi pariwisata;
- Pemberdayaan pelaku usaha kecil, menengah dan koperasi;
- Pengembangan sarana dan prasarana Industri kecil dan Menengah (IKM);
- Pengembangan komoditas unggulan daerah.

5. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial, dan Pemanfaatan Tata Kelola Pemerintahan.

Program prioritas ini akan diwujudkan melalui fokus pada beberapa agenda, kegiatan antara lain:

- Pembangunan fasilitas sarana peribadatan dan sosial budaya;
- Fasilitasi pengiriman tenaga-tenaga pembina keagamaan;
- Pengembangan Pemandokan dan Pelayanan Haji;
- Pelatihan dan Bimbingan Teknis untuk peningkatan kapasitas aparatur pemerintah;
- Peningkatan disiplin dan kinerja aparatur;
- Pelaksanaan proses seleksi yang sistematis tentang kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) bagi setiap aparatur yang akan menduduki jabatan strategis;
- Peningkatan kemampuan aparat melalui Pendidikan Formal pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi (khususnya S1, S2 dan S3), kursus, pelatihan, magang, dan penjenjangan;
- Perbaikan kesejahteraan pegawai;
- Peningkatan peran DPRD dalam pelaksanaan fungsi *legislasi*, *budgeting*, dan *controlling*;
- Mendorong percepatan pemekaran/pembentukan daerah persiapan kabupaten/kota;
- Peningkatan pelayanan pembangunan melalui Informasi Teknologi (IT);
- Peningkatan kualitas pengelolaan APBD;
- Mendorong kerjasama pembangunan Pemerintah-Sawasta (KPS);

E. Penutup

Demikian Visi dan Misi ini disusun dengan mencermati realitas obyektif perkembangan dinamika di tingkat daerah, regional dan nasional untuk dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan daerah 5 (lima) Tahun kedepan. Lima tahun masa kepemimpinan adalah waktu yang sangat singkat dalam membidani pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Ikhtiar untuk kemajuan daerah ini dapat dilakukan melalui kerja sama dan sinergitas antar tingkat pemerintahan; Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan lembaga Legislatif, serta partisipasi *stakeholders*. Permasalahan yang ada diharapkan dapat diatasi melalui koordinasi, sinkronisasi dan padu serasi sehingga tercipta sinergitas, guna mewujudkan “**Maluku Utara Sejahtera 2023**”. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa senantiasa meridhoi semua langkah ikhtiar membangun Maluku Utara ke depan.

Sofifi, 8 Januari 2017

Calon Gubernur Maluku Utara 2018-2023

Calon Wakil Gubernur Maluku Utara 2018-2023



KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc, M.Pd.I



Ir. M. AL YASIN ALI, M.MT